



## Polarisasi dan Suksesi Kekuasaan Politik Indonesia dalam Wacana Konsolidasi Demokrasi

Zulkarnain<sup>1)</sup>, Katimin<sup>2)</sup>, Elly Warnisah Harahap<sup>3)</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[zulkarnain4270@gmail.com](mailto:zulkarnain4270@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[profkatimin2@gmail.com](mailto:profkatimin2@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[ellywarnisyah@uinsu.ac.id](mailto:ellywarnisyah@uinsu.ac.id)<sup>3)</sup>

### Abstrak

Polarisasi politik muncul setiap kali kontestasi politik dimulai dan proses demokratisasi Indonesia mengalami polemik seputar isu tersebut, tidak saja di tingkat elit, tapi merambah pada konstituen di akar rumput. Kekhawatiran banyak pihak, polarisasi dapat membelah dan menciptakan segregasi sosial, hal itu dianggap menghambat kemajuan bangsa yang majemuk. Penelitian ini bertujuan memberikan pandangan objektif seputar isu polarisasi dalam persepektif akademis sebagai dasar pertimbangan politik, bagi multikulturalisme Indonesia dengan pilihan politik yang sangat multidimensional. Studi pustaka, *questioner*, dan investigasi mendalam digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui analisis komprehensif, terutama perbedaan motif dan orientasi politik dari aspek sosiologis. Hasilnya secara lebih objektif polarisasi dianggap tidak berbahaya bagi keutuhan, masa depan bangsa dan demokrasi Indonesia. Kesimpulannya bahwa polarisasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses demokratisasi dengan paradigma beragam seperti: gagasan, ideologi, kebijakan, dan teori politik berbeda. Heterogenitas pilihan politik elit dan konstituen mengkonseptualisasikan konsolidasi demokrasi dalam suksesi kekuasaan.

Katakunci: Polarisasi, Teori Politik, Konsolidasi, Demokrasi

### PENDAHULUAN

Isu polarisasi kembali menguat di tengah situasi panas jelang perhelatan pemilu 2024, agenda politik lima tahunan bangsa Indonesia yang mengadopsi sistem demokrasi. Pemilu sebagai proses perubahan kekuasaan politik, sejatinya sebuah kegembiraan. Sebab melalui pemilu, harapan untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil menjadi terbuka lebar. Namun kegembiraan tersebut dihantui ketakutan disintegrasi bangsa oleh isu yang bernama polarisasi. Muncul dugaan Ada sebuah kekuatan tersembunyi yang terus-menerus menyuarakan isu bahaya polarisasi dalam kontestasi politik. Absurditas antara ilusi mitigasi bencana perpecahan bangsa akibat dinamika politik, atau sebuah upaya menciptakan pemilu elegan dan demokratis. Padahal politik jelas tidak dapat dipisahkan dari polarisasi yang menjadi bagian inheren proses demokratisasi serta peristiwa yang menyertainya.

Polarisasi politik di masa lalu bukan merupakan persoalan bagi Indonesia, hingga pasca era otoriter Suharto pada tahun 1998. Demokrasi ditandai kurangnya persaingan ideologis dalam dinamika politik Indonesia. Ada dua sisi polemik politik kepartaian sepanjang sejarah kebangsaan Indonesia, perbedaan ideologis tertentu antara partai-partai Islam yang mencari peran lebih besar untuk syariat Islam dalam kehidupan publik dan kenegaraan dan partai-partai pluralis yang mempromosikan visi negara Indonesia yang multiagama. Namun kampanye politik biasanya bersifat inklusif. Partai dan politisi



juga secara rutin berkolaborasi melintasi perbedaan ideologis karena tujuan utama mereka adalah memasuki pemerintahan dan mendapatkan akses ke sumber daya patronase negara. Akibatnya, beberapa analis menyimpulkan bahwa Indonesia adalah “salah satu negara demokrasi yang paling tidak terpolarisasi di Asia” (Eve Warburton). Sebuah nilai positif yang mengembirakan.

Ada banyak indikator bahwa kecemasan munguatnya polarisasi politik muncul sejak 2014. Tiga pemilihan umum telah membuat negara ini diduga lebih terpecah daripada beberapa dekade sebelumnya: pemilihan presiden 2014, pemilihan gubernur di Jakarta tahun 2017, dan pemilihan presiden tahun 2019. Persaingan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan lawannya, Prabowo Subianto, memicu perpecahan politik yang sebelumnya laten antara Islamis dan pluralis atau Islamis dan sekuleris. Dugaan itu semakin nyata ketika berbagai kekuatan politik dan sosial telah bersatu sejak 2014 untuk memecah belah politik Indonesia, dan polarisasi berikutnya mengancam institusi demokrasi dan tatanan sosial negara yang rentan.

Namun politik yang digerakkan oleh berbagai kekuatan patronase Indonesia terus mengumpulkan perpecahan partisan sampai batas tertentu—tergerus oleh fenomena ketika Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Sebuah restorasi budaya politik kebangsaan dalam meredam sentimen kelompok dan menjinakkan polarisasi. Sikap tersebut merupakan pragmatisme politik langka jika dibandingkan suksesi kekuasaan sebelumnya pada dua sesi pemilihan langsung yang dimenangkan SBY selama dua periode, nyaris tidak ada rival politik SBY bergabung di pemerintahan.

Menurut banyak analis, polarisasi politik memang sedang meningkat di banyak tempat misalnya di Amerika Serikat ketika pertarungan antara Joe Biden melawan Donald Trump (Arceneaux et al., 2013; lihat juga Abramowitz & Saunders, 2008; Pusat Penelitian Pew, 2017), begitu juga di seluruh dunia (Gidron et al., 2019) termasuk Indonesia. Saat dimana elit politik (Heaney et al., 2012), pejabat terpilih (Hare & Poole, 2014), dan orang-orang biasa (Frimer et al., 2017) terpolarisasi.

Untuk kasus Indonesia ada dua bentuk polarisasi politik yang berbeda. Yang pertama adalah polarisasi ideologi, yang merupakan perbedaan keyakinan, sikap, pendapat politik, dan pendirian lawan politik (Dalton, 1987). Yang kedua adalah polarisasi afektif, didasarkan pada pekerjaan mengingat peran identitas dalam politik (Mason, 2018), dan bagaimana arti-penting identitas dalam kelompok (misalnya partai politik) dapat memperburuk permusuhan kelompok luar (misalnya Gaertner et al., 1993; Iyengar et al., 2012). Polarisasi afektif menilai sejauh mana orang menyukai (atau merasakan kehangatan terhadap) sekutu politik mereka dan tidak menyukai (atau merasa kurang hangat terhadap) lawan politik mereka (Iyengar et al., 2012). Polarisasi politik juga sangat tergantung dengan peran media dalam menginisiasi perbedaan (Emily Kubin & Christian von Sikorski, 2021).

Saat ini ada kekhawatiran komunal bahwa polarisasi politik semakin menguat disebabkan meningkatnya suhu politik terutama menjelang tahun pemilu 2024. Kekhawatiran itu dipertegas oleh cawe-cawe presiden Jokowi yang diduga mempersiapkan calon penggantinya dengan mendorong sosok tertentu—sebuah sikap yang dianggap tidak netral. Fenomena ini membuat situasi tidak kondusif, padahal proses suksesi politik telah berlangsung berulang kali dengan berbagai bumbu intrik politik bahkan berakhir gugatan atas tidak diakuinya keputusan KPU RI yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf oleh kubu Prabowo-Sandi pada pilpres tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Permasalahannya adalah apakah polarisasi seperti pada pilpres tahun 2019 akan terulang kembali di 2024, padahal situasi pertarungan politik telah berpindah ke calon berbeda dan hanya menyisakan Prabowo sebagai pemain lama yang kembali mencalonkan diri melalui partai Gerindra. Koalisi juga semakin mencair ditandai berpindahnya partai-partai lingkaran dalam pendukung partai penguasa PDIP, kemudian keluar membentuk poros baru dengan fatner yang berbeda. Nasdem sebagai partai papan atas yang sebelumnya bersatu di bawah panji rezim Jokowi, bergabung bersama Demokrat dan PKS partai luar pemerintahan dalam membentuk koalisi perubahan, kemudian mengusung calon presiden sendiri Anis Baswedan. Sebuah dinamika perubahan gradual dalam format politik nasional yang multikompleks.

Pada pemilu priode sebelumnya, polarisasi politik dikaitkan dengan sentimen agama dan politik identitas. Kemunculan Anis Baswedan, bakal calon presiden koalisi perubahan mengindikasikan bibit polarisasi politik gaya lama dengan format baru kembali eksis. Fakta tersebut memperkuat sinyal bahwa tema sentimen primordialisme masih terus dipergunakan kelompok patronase negara. Rekam jejak Anis tahun 2019 didukung oleh kelompok keagamaan yang distigma sebagai radikal, membuka peluang besar penggiringan opini ke arah itu.

Studi ini perlu dibahas mengingat terlalu banyak energi yang telah dihabiskan oleh bangsa



Indonesia untuk mempersoalkan hal-hal yang lumrah dalam politik. Pengalaman menyakitkan yang terjadi pada pilpres tahun-tahun politik sebelumnya harus menjadi atensi kita dalam mengawal demokrasi melahirkan pemimpin kredibel melalui proses suksesi yang elegan. Bahwa polarisasi memang merupakan suatu keharusan terjadi dalam dinamika pemilu yang demokratis. Tentu berbedanya dengan negara monarki absolute atau pada pemerintahan otoriter, tidak boleh ada peluang pandangan politik yang berseberangan dengan simpul-simpul arus kuat kekuasaan. Persoalannya, dalam mengulas fenomena politik nasional, banyak analisis teori politik selalu mengaitkan antara polarisasi politik dengan sentimen primordialisme atau politik identitas yang belum segera beranjak. Padahal sepanjang sejarah politik Indonesia kontemporer, polarisasi dapat terjadi karena banyak faktor, yang salah satunya adalah model pemilihan langsung.

## METODE

Pada penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan Eve Warburton, atau peneliti lain seperti Emily Kubin & Christian von Sikorski (2021), polarisasi dihubungkan dengan sentimen primordialisme dan penggunaan media yang massif. Metode ini sangat sedikit memberikan argumen penguat bahwa polarisasi dalam demokrasi elektoral, terutama untuk kasus Indonesia tidaklah sesimpel itu. Ada banyak indikator yang harus didalami dengan pendekatan lebih kritis dan komprehensif, untuk dapat mengungkap benang merah sesungguhnya dari semua faktor yang memunculkan polarisasi politik.

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba menela sisi lain penyebab polarisasi, dan membandingkannya dengan perilaku politik elit politik dan masyarakat sebagai konstituen. Melalui observasi, investigasi yang mendalam dan penyebaran kuisioner, ditemukan kaitan antara perilaku politik, ideologi politik, bahkan gagasan politik para elit politik yang bertarung di kancah pemilu. Dan berdasarkan studi pustaka (*library research*) dikenal berbagai teori politik, kemudian semua data diverifikasi dan menjadi bahan analisis untuk menghubungkan teori politik tersebut dengan tren polarisasi politik yang terjadi. Hasilnya akhirnya didapatkan penyebab polarisasi politik sangat beragam dan ditentukan oleh banyak faktor. Masing-masing faktor berdiri sendiri atau kadang bertemu dalam satu kasus secara berkelindan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya polarisasi politik, terutama pasca reformasi tahun 1998. Berbagai faktor terbentuk karena berubahnya sistem politik, baik aturan pemilu, amandemen konstitusi, transparansi, transformasi kedaulatan dalam penentuan kepala negara, bahkan persoalan klasik, yaitu ketidakadilan dalam pengelolaan kekuasaan dan kebijakan publik. Faktor-faktor pembentuk polarisasi politik di antaranya:

### 1. Sistem Pemilihan Langsung

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 6A dan UU NO 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, dan UU nomor 32 tahun 2004, tentang pemilihan kepala daerah secara langsung membuka ruang yang sangat luas terjadinya polarisasi politik, sebab potensi perbedaan semakin terbuka lebar. Demokrasi dengan sistem multi partai, mendorong para pendukung di luar parlemen berhadapan langsung dengan pola persaingan terbuka, mengembangkan sentimen masing-masing berdasarkan jargon-jargon politik yang diciptakan oleh partai mereka. Perang narasi dan opini, berbagai sentimen, seperti agama, suku, etnisitas, ideologi dan lain-lain dikembangkan sedemikian rupa. Gejala ini dengan mudah menstimulus perbedaan yang mengarah kepada polarisasi politik, terutama para pendukung di akar rumput yang mudah terpropokasi. Pemilihan langsung menyebabkan konstituen terpolarisasi semakin tajam dapat membelah persatuan.

Hal berbeda, bila pemilihan misalnya seperti presiden, gubernur, walikota atau bupati dilaksanakan melalui lembaga perwakilan, maka polarisasi akan cenderung mengecil dan tidak berdampak secara langsung bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contoh pemilihan Presiden pada awal reformasi melalui mekanisme MPR, polarisasi yang timbul hanya terbatas di kalangan anggota MPR, yaitu kelompok cerdas politik yang akan menggunakan hak pilihnya. Seperti pada pemilihan Presiden tahun 1999, antara Abdurrahman Wahid (Gusdur) berhadapan dengan Megawati Sukarno Putri, yang dimenangkan oleh Gusdur. Pertarungan di MPR berjalan 'keras' bagaimana poros tengah menelikung calon presiden Megawati tokoh sentral PDIP yang menang dalam pemilu tahun 1999. Padahal sebagian besar masyarakat paham bahwa kader PDIP loyalis yang begitu getol membela pimpinannya. Tetapi karena pertarungan terjadi di dalam, massa akar rumput tidak dapat berbuat banyak.



## 2. Perbedaan Ideologi

Partai-partai politik telah eksis di Indonesia dan memiliki platform, asas, serta orientasi politik yang berbeda-beda. Perbedaan misi, visi, ideologi, dan program partai-partai politik, juga menimbulkan polarisasi politik di tingkat elit dan pendukung partai. Masing-masing partai dan para pendukungnya pasti menganggap partainya lebih baik karena dianggap dapat menyalurkan aspirasi mereka yang sangat beragam, melalui program-program partai. Ideologi yang diusung oleh satu partai, akan mempengaruhi masyarakat pemilih, sesuai haluan dan pandangan politik yang sama. Seorang pemilih berideologi nasionalis, atau sekular, akan cenderung mendukung atau memilih partai nasionalis sekular. Begitu juga, seorang pemilih muslim, akan tertarik mendukung partai yang berhaluan Islam atau partai nasionalis religius. Untuk memperoleh dukungan pemilih, elit partai menggunakan kreativitasnya memilih tagline menarik sarat makna ideologis.

Pilihan politik yang didasari pandangan ideologis berpotensi menimbulkan polarisasi politik sampai ke tingkat akar rumput. Yaitu kelompok rentan yang awam politik dan tidak dididik mengerti politik. Bahkan menurut M. Toha, di kalangan terbatas, sebagian tokoh terkemuka masyarakat yang juga awam politik, dieksploitasi hanya untuk mengumpulkan dukungan sebagai vote getter dalam pemilu (M.toha, 2018). Fakta ini menegaskan, bahwa sistem multi partai dengan beragam ideologi menjadi faktor penyebab timbulnya polarisasi politik lebih luas di tengah masyarakat.

## 3. Politik Identitas

Identitas menurut Dwi Sulisworo dipandang sebagai seperangkat makna yang melekat pada peran yang ditempati individu dalam struktur sosial. Identitas terserap dari, kata bahasa Inggris "*identity*" yang berarti memiliki tanda atau ciri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau suatu yang membedakannya dari yang lain (Dwi, 2012: 4). Di sisi lain Elman menyebutkan, dalam dunia modern kontemporer, identitas kerap dihubungkan dengan teori-teori tentang diri (*the self*), atau interpretasi diri terhadap dirinya sendiri (*self interpretation of itself*), sehingga dapat dimaknai identitas seseorang adalah siapa orang itu (Elman Sulaiman, 2022:13). Dari sudut sosiologis, identitas sering juga dikaitkan dengan status sosial, yaitu kedudukan seseorang dalam struktur sosial kemasyarakatan yang membedakannya terhadap kelompok warga negara lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, jika dikaitkan dengan konteks politik (*politics of identity*), politik identitas berarti status seorang dengan ciri yang disandangnya dalam struktur sosial yang menunjukkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya dalam suatu kelompok atau komunitas politik. Kesimpulan ini diperkuat dengan analisis Frederik Barth (1988) yang dikutip oleh Endang sari dalam jurnalnya yang dipublikasi pada tahun 2016. Menurutnya, identitas etnik dan agama akan selalu menduduki tempat dalam diri seorang untuk ditampilkan di antara sekian banyak identitas pada dirinya. Dengan identitas itu dia akan melakukan komunikasi atau interaksi terhadap orang lain yang mengenalnya melalui identitas atau ciri tersebut (Endang Sari, 2006, 149-150).

Identitas adalah ciri khusus yang disematkan kepada sesuatu, yang menjadi tanda pengenal padanya. Identitas atau ciri khusus yang menempel pada seseorang menjadikannya dikenal dengan ciri tersebut. Dari perspektif sosiologis, yang menjadi ciri atau identitas manusia biasanya adalah suku, bahasa, warna kulit, gender, agama, ideologi atau keyakinan, budaya dan lain-lain.

Sementara politik identitas adalah penggunaan simbol atau pengenal tertentu untuk menarik minat konstituen atau pemilih agar mendukung kepentingan politik tertentu. Ada kecenderungan terbesar di negara-negara transisi demokrasi seperti Indonesia, partai politik menggunakan politik identitas untuk menyentuh semangat keagamaan yang membangkitkan sentimen atau rasa "bersama" bagi calon pemilih. Isu-isu keagamaan dipandang sangat efektif untuk menarik minat sehingga membuat para pendukungnya ikut bergabung dan menjadi bagian penting, untuk memperkuat suara partai tersebut.

Politik identitas biasanya dikemas dengan menggambarkan kontradiksi dua hal yang dipandang saling bertentangan dan tidak bisa disamakan atau disatukan hingga menimbulkan polarisasi atau kontraksi yang kuat. Misalnya tokoh atau elit partai X beragama A, memandang agamanya lebih baik dari agama tokoh atau elit partai Y beragama B, yang menjadi rival politiknya. Maka pemilih beragama A dibujuk memilih partai X yang elitnya seagama (A), bukan partai Y yang tokohnya meyakini agama B. Identitas juga dapat diciptakan dari sentimen kesukuan tertentu yang dijadikan simbol kesatuan politik antara partai tertentu dengan konstituentnya. Penanda-penanda simbolis biasanya dipandang lebih efektif menyulut emosi manusia ketimbang program-program atau kebijakan-kebijakan politik yang berkisar pada aspek ekonomi atau kesejahteraan sosial, sebagai dimensi lain dari persoalan politik.

Jon Simon (*The Power Political Images*, 2006), menganggap politik demokrasi modern adalah politik pencitraan dimana penampilan melebihi hal substansi, dan kepribadian lebih penting dari pada

kebijakan. Citra politik, dibangun dengan memperlakukakan agama untuk meraih simpatik publik. Menurutnya, ideologi, visi, misi, dan program yang harusnya menjadi panduan rakyat memilih calon pemimpin bergeser hanya pada keutamaan visualisasi personal jangka pendek semata. Hasilnya, pemimpin muncul hanya berdasar preferensi emosional rakyat sesaat, namun tidak mampu menuntaskan persoalan utama bangsa secara keseluruhan, yang merupakan beban politik.

Francis Fukuyama (2018: 24) menjelaskan mengenai konsep *Thymos*. Yaitu bagian dari jiwa manusia yang selalu haus pengakuan atas harga diri. Dahaga yang menjadi faktor penentu secara manusia bagaimana memperjuangkan identitas diri dan kelompok, sekaligus menjadi pendorong fanatisme identitas suku, agama, ras, golongan, dan bangsa. Faktor *thymos* inilah menurutnya yang menjadi salah satu akselerator polarisasi dalam masyarakat yang menyebabkan pembelahan kian tampak.

#### Jumlah kandidat yang berkontestasi

Jumlah kandidat yang bertarung dalam pemilihan presiden atau kepala daerah juga berpeluang besar menciptakan dan mempengaruhi polarisasi politik, terutama di tingkat akar rumput. Karena fakta yang lalu, jika ada dua calon, *head to head* seperti pilpres 2019, polarisasi akan menguat. Pada pemilihan Presiden 2004 dan 2009, pasangan calon yang bertarung lebih dari dua pasang. Polarisasi politik tidak menguat seperti pada pilpres 2014 dan 2019. Pertarungan politik hanya terbatas pada tataran isu, visi-misi dan program kerja masing-masing kandidat. Para pendukung dan partai politik hanya disibukkan dengan penguatan kelompok pemilih, sosialisasi, dan melebarkan jaringan pendukung di tingkat pemilih.

#### 4. Ketidakadilan

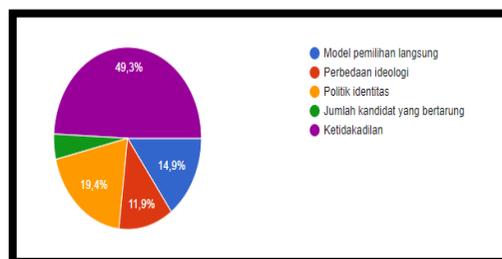
Ketidakadilan adalah persoalan pelik bagi suatu negara. Gejala ini hadir dilatari banyak hal, penguasa terlalu dominan, despotisme, otoriter, bertindak curang, berat sebelah, diskriminatif dan lain-lain. Penguasa yang dianggap tidak adil memicu munculnya gerakan sosial sebagai reaksi atas sikap negatif tersebut. Bila ketidakadilan terjadi dalam waktu yang relatif lama, gerakan sosial dengan skala besar, berubah menjadi revolusi politik menuntut pergantian rezim penguasa bahkan system bernegara.

Ketidakadilan identik dengan kezaliman, lawannya adalah adil, yaitu sikap proporsional, menempatkan suatu sesuai dengan haknya. Kata 'adil' atau *al-adalah* berasal dari terminologi Al-Quran kitab suci umat Islam. Adil juga identik dengan kata jujur, ikhlas dan amanah. Sementara lawannya 'zalim,' artinya bodoh, berkhianat, culas, iri, dengki, diskriminatif, merampas hak orang, semena-mena, serakah, loba dan masih banyak arti lain yang dapat disematkan pada kata zalim.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap tidak adil yang dipamerkan penguasa, menjadi alasan kuat bagi rakyat menuntut ditegakkan keadilan. Polemik ini berujung terciptanya polarisasi politik yang dapat menggiring kelompok besar rakyat melakukan perlawanan, tidak saja perlawanan secara ideologis bahkan secara fisik yang melahirkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Faktor ketidakadilan pihak penguasa yang menyebabkan polarisasi politik, jauh lebih berbahaya menggiring terjadinya pembelahan dan disitegrasi bangsa ketimbang alasan lainnya seperti politik identitas.

Tabel 1.

No	Faktor Pembentuk Polarisasi	Persentase Polarisasi
1	Sistem pemilihan langsung	14,9 %
2	Perbedaan ideologi	11,9 %
3	Politik identitas	19,4 %
4	Jumlah kandidat yang berkontestasi	4,6 %
5	Ketidakadilan	49,3 %
total		100 %



Gambar 1. Persentase Polarisasi



Data pada table 1 di atas memperlihatkan bahwa faktor-faktor pembentuk polarisasi politik menyumbang penyebab pembelahan dengan prosentase yang beragam. Masing-masing faktor berkontribusi dengan dampak pembelahan yang berbeda. Dan angka tertinggi ada pada ketidakadilan sebesar 49,3 %, berikutnya dengan jumlah di bawah menyusul politik identitas, model pemilihan langsung di urutan ke 3, perbedaan ideologi berada di urutan ke 4, dan terakhir jumlah kandidat yang bertarung.

Fakta ini merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia. Suatu kilas balik semangat kebangsaan yang tumbuh di kalangan para pendiri bangsa, ketika mereka meletakkan frase “Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai tujuan negara dalam preambule konstitusi UUD 1945. Kalimat sakti ini sangat sulit terucap mengingat sudah 77 tahun Indonesia merdeka dengan rezim yang silih berganti. Ketidakadilan senantiasa jadi problematika kebangsaan yang entah sampai kapan berakhir. Pertanyaannya, apakah mekanisme suksesi kekuasaan saat ini sudah tepat, dengan biaya triliunan dan dampak sosial politik yang jauh lebih besar bagi bangsa, namun tidak juga dapat menemukan pemimpin ideal untuk mengurai benang kusut kemelut ini.

Data tersebut juga memberikan keterangan bahwa politik identitas berada di urutan ke dua, angka tersebut tidak terlalu signifikan berdampak pada pembelahan di publik. Para pemilih telah memahami bahwa identitas menjadi bagian tak terpisahkan dari kontestasi politik elektoral. Identitas juga menjadi sebab munculnya partai politik yang beragam mewakili kecenderungan pilihan-pilihan politik masyarakat, yang terangkum dalam agenda nasional. Di samping itu, identitas juga memunculkan banyak partai politik dengan perbedaan platform, orientasi, dan strategi. Begitu juga perbedaan ideologi, hanya di angka 12,1 % saja. Prosentase tersebut menjelaskan bahwa, ideologi tidak lagi menjadi faktor pembeda di masyarakat. Artinya Pancasila dapat diterima sebagai ideologi dan falsafah pemersatu bangsa. Sebaliknya, ketidakadilan penyumbang terbesar prosentase penyebab pembelahan. Hal ini sangat terlihat di era kepemimpinan presiden Jokowi, terutama pada paruh terakhir periode pertama kemudian dilanjutkan di periode ke dua pasca pilpres 2019.

Pemilihan langsung mengambil posisi di urutan ke 3 sebanyak 13,6 %. Pemilihan langsung menjadi faktor penting penyebab polarisasi, terutama di pemilihan presiden 2014 dan 2019. Perbedaan pilihan politik di antara para pendukung menguat, tidak hanya di level partai politik, tetapi berimbas ke akar rumput. Saling klaim keunggulan calon masing-masing berubah menjadi perang terbuka terutama di media sosial. Polarisasi tidak terbatas pada visi-misi, namun merambah pada hal-hal pribadi calon presiden yang sangat subjektif. Hal berbeda justru terjadi pada pemilihan presiden awal reformasi tahun 1999 ketika sistem pemilu belum berubah. MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jumlah anggota MPR yang sangat terbatas memperkecil potensi munculnya polarisasi. Dan polarisasi hanya terjadi di ruangan kecil gedung DPR-MPR yang tidak berimbas keluar. Fakta ini memperkuat perlunya upaya evaluasi terhadap model sistem pemilihan langsung seperti berlaku saat ini. Sementara itu, rivalitas Jokowi-Prabowo berakhir dengan bergabungnya kubu Prabowo ke lingkaran kubu Jokowi masuk di dalam pemerintahan.

Di tempat terakhir faktor penyebab polarisasi politik dalam table 1 adalah jumlah kandidat yang berkontestasi. Faktor ini sangat tergantung pada presidensial threshold yang ditetapkan UU Pilpres dan UU Pilkada sebagai ambang batas pengajuan calon presiden atau kepala daerah. Pembatasan tersebut menjadi alat penentu berapa jumlah kandidat yang akan berlaga di pemilu, di samping pengaruh kepentingan pragmatis dan budaya politik transaksional aktor politik. Pilpres 2014 dan 2019 menjadi contoh penting polarisasi politik menguat karena hanya dua pasang calon presiden yang berlaga. Berbeda dengan pilpres 2004 dan 2009 yang diikuti oleh lebih dari dua pasang capres, polarisasi tidak terlalu mengalami friksi yang berarti.

Gambaran pada table merupakan dinamika yang relevan dengan budaya politik di Indonesia sebagai proses demokratisasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Sebagai sebuah tatanan politik yang menjamin hak-hak asasi manusia dan menjadi pilihan rasional bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan kenegaraan, demokrasi juga mengalami degradasi nilai humanisnya, berganti kekerasan, intimidasi, fitnah dan pemaksaan. Eksistensi demokrasi kemudian dipertanyakan jika dihadapkan pada perilaku elit politik, budaya politik komunal, dan hasil akhir suksesi politik dengan kualitas pemimpin yang rendah. Kondisi politik ini setidaknya melahirkan konsekuensi bahwa konsolidasi demokrasi merupakan sebuah keniscayaan.

Konsolidasi demokrasi mesti dapat mereduksi polarisasi politik nasional untuk menghasilkan kualitas pemilu yang lebih baik. Hambatan-hambatan tercapainya tujuan tersebut harus diminimalisir melalui mekanisme komunikasi direk yang lebih transparan. Gejala-gejala perubahan peta politik baru perlu diapresiasi dengan memberi ruang kebebasan berekspresi bagi para politisi, pegiat demokrasi dan



masyarakat luas. Di antara gejala tersebut adalah munculnya pergeseran peta politik dengan model koalisi yang terus berubah hingga penentuan calon presiden definitif yang ditetapkan KPU RI November 2023. Adanya pergeseran isu politik dari sekadar persoalan politik identitas ke isu seputar ide dan gagasan politik yang jauh lebih elegan dan modern dari populisme yang lagi mengetren sejak pilpres 2014. Gejala ini betul-betul baru dalam kancah politik nasional yang sangat penting diapresiasi dengan bijak. Sebab sejatinya, perubahan kultur politik tidak akan pernah terjadi jika ruang kebebasan terus dibatasi dan budaya politik lama yang kotor oleh *money politic* tetap dipertahankan.

Pemilu 2024 boleh jadi merupakan pertarungan besar bagi elit politik, pengurus partai, aktivis demokrasi, penyelenggara pemilu, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, apakah akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan berguna bagi kemajuan dan masa depan bangsa. Yaitu proses pemilu yang elegan, suksesi yang aman serta menghasilkan kepemimpinan nasional yang kuat, cerdas dan brilian untuk menuntaskan persoalan bangsa yang multidimensional. Atau tetap berlangsung seperti biasa dengan prilaku curang yang membudaya tanpa menghasilkan kepemimpinan nasional yang diharapkan membawa perubahan signifikan bagi kemajuan.

Konsolidasi demokrasi mesti mampu menggeser atribut politik usang dari jargon politik, cawe-cawe, kampanye hitam, stigmatiasi negatif dan hoaks, berganti menjadi gagasan, ide dan literasi politik. Gagasan dan ide-ide pembangunan yang merupakan program dan kebijakan pemerintah di masa mendatang sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana para calon presiden mampu menangani persoalan krusial bangsa Indonesia. Permasalahan tingginya angka pengangguran, pendapatan perkapita yang masih tergolong rendah untuk tingkat ASEAN, masalah tata kelola sumber daya alam, korupsi, dan utang negara yang makin membesar menjadi tugas utama presiden terpilih. Bagian ini merupakan titik terpenting mengapa suksesi kekuasaan politik perlu segera dilakukan. Bahkan keinginan rezim Jokowi dan pendukungnya untuk memperpanjang masa jabatan presiden, isu penundaan pemilu, dan upaya merubah konstitusi ditolak mentah-mentah oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Masalahnya bukan hanya soal pembatasan masa jabatan presiden, tetapi fakta kuat, bahwa rezim berkuasa selama hampir dua periode dianggap gagal nununtaskan persoalan yang ada, lalai melaksanakan amanah konstitusi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa dan negara.

Suksesi kekuasaan politik adalah dinamika konstitusional dan budaya menghasilkan kepemimpinan nasional, tidak boleh terjebak pada mekanisme politikal entrepreneur (political entrepreneur) dengan kecenderungan manipulatif. Penggiringan opini elektabilitas melalui survey bayaran untuk kepentingan pihak tertentu menunjukkan adanya bisnis politik yang marak di Indonesia. Hal ini membuat rakyat pemilih tidak lagi objektif dalam menentukan pilihan. Survey sungguh mengacaukan pandangan pemilih untuk mengenal capres berdasarkan rekam jejak serta kemampuan makismal yang pernah dihasilkan dari pengalaman memimpin bangsa, terhalang oleh info survey yang manipulatif dan massif. Survey yang syarat kepentingan tidak dapat dijadikan para meter objektif untuk mengukur sesuatu. Dan sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan dari mana asal dana operasional survey tersebut dan pihak-pihak mana yang memiliki kepentingan secara prinsip terhadap hasilnya. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa demokrasi Indonesia sedang dibajak oleh berbagai kepentingan pragmatis yang mereduksi kedaulatan rakyat dengan perlahan oleh patronase negara atau oleh oligarki.

Untuk menjawab kebutuhan agar polarisasi politik negatif dapat dihindari, orientasi dan strategi politik para calon presiden dan partai pendukungnya harus berubah arah, dari mengumbar janji-janji manis ke arah menawarkan solusi praktis menghadapi masalah bangsa. Dari ambisi hanya mengejar kemenangan, beralih menyertakan edukasi politik yang bijak dalam kampanye agar rakyat cerdas memilih. Dari strategi kampanye hitam menyerang lawan politik, beralih ke adu ide dan gagasan, mana yang lebih baik, tepat dan rasional. Dari mengumbar sentimen primordialisme, berubah menjadi diksi dan literasi kebangsaan modern dan beradab. Dan dari penampilan serta gaya populis, bertransformasi ke sikap kreatif dan realistis menghimpun potensi bangsa untuk perubahan berskala besar.

Memasarkan ide dan gagasan dalam literasi politik kebangsaan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi bukanlah persoalan mudah. Diperlukan seorang calon pemimpin yang tidak hanya bermodal populer atau dipopulerkan, tetapi sosok cerdas dan piawai mengelola persoalan bangsa dengan solusi tepat guna. Presiden Indonesia memimpin populasi yang besar dengan luas wilayah dan kekayaan alam yang tiada taranya, haruslah seorang yang sangat memahami persoalan bangsa. Masalah pundamennya, sistem pemilu yang menguras keuangan negara cukup besar terbukti tidak efektif menyeleksi sosok yang paling tepat. Figur dengan kualifikasi pemikiran bagaimana mempertemukan antara gagasan dan solusi komprehensif terhadap persoalan bangsa. Mempertemukan antara nilai-nilai kemanusiaan dan orientasi pembangunan, dan mempertemukan antara gagasan-gagasan pembangunan



berkemajuan dengan rasa persatuan, kesetaraan dan keadilan.

Dalam pidato politiknya di hadapan massa pendukung di Lapangan Tenis Indoor, kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, Minggu, 7 Mei 2023, calon presiden Anis Rasyid Baswedan mengusung tema "Luruskan Jalan, Hadirkan Keadilan." Dia mengawali pemaparan tentang pembentukan negara kesatuan dari mulai Sumpah Pemuda 1928, satu negara lewat kemerdekaan tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Mosi Integral Natsir tahun 1950. Dan kesatuan wilayah melalui Deklarasi Djuanda pada tahun 1957. Menurutnya, dunia akhirnya mengakui satu wilayah teritorial setelah pengesahan *United nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982. Anis juga menyayangkan kemakmuran di antara sesama anak bangsa ini yang belum terwujud, melalui kemenangan pemilu keadilan sosial inilah yang akan diwujudkan.

Menurut beberapa kalangan, Anis sudah memulai kandidasinya dengan ide dan gagasan. Tren baru politik nasional yang menyajikan kemampuan mengolah gagasan kritis dan literasi politik kebangsaan melalui pidato. Hal ini menjadi tantangan bagi para calon presiden untuk melakukan hal yang sama seperti Anis sehingga Pilpres 2024 akan diwarnai dengan adu gagasan. Pengetahuan sebagai sumber gagasan menjadi syarat penting bagi seorang pemimpin sekelas presiden. Ketentuan ini menghendaki kualitas pendidikan calon presiden mesti jelas, bukan dengan latar belakang pendidikan yang buruk. Sebab negara hanya bisa dibangun dengan fikiran bukan dengan nafsu kekuasaan dan kemarahan.

Ada banyak ide yang dapat diaktualisasikan pada agenda politik praktis tidak hanya terbatas pada proses elektoral, tetapi pelebagaan kebijakan public (William N. Dunn, 2003) saat kekuasaan dijalankan. Aspek ini justru merupakan bagian terpenting dari seluruh persoalan bangsa yang terabaikan. Partai politik lebih senang menawarkan produk politik bergaya populisme ketimbang hal-hal yang rasional. Misalnya, kampanye tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) berkisar Rp150.000 per bulan. Menurut pemerintah dana ini diberikan cuma-cuma sebagai konvensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan angka Rp 36 triliun dalam tiga tahap per empat bulan sekali. Artinya untuk tiap tahap penyaluran BLT pemerintah mengeluarkan Rp12 triliun untuk 20 juta rakyat Indonesia. Padahal pemerintah sendiri memperoleh keuntungan dari selisih kenaikan harga BBM selama setahun lebih kurang Rp 58 triliun. Belum lagi imbas dinaikannya harga BBM, akan diikuti kenaikan berbagai harga kebutuhan rakyat seperti sembako, TDL, transportasi, tarif air dan lain-lain, berdampak langsung bagi meningkatnya beban kehidupan rakyat yang kian memberatkan. Selain itu, secara moral pemberian BLT juga tidak elegan. Terkesan pemerintah senang melihat rakyat berantrian menerima bantuan seperti para pengemis. Kebijakan-kebijakan seperti ini, jarang menjadi perhatian partai, terutama pihak yang berposisi dengan pemerintah.

Di samping itu, partai politik kurang menyoroiti persoalan independensi kekuasaan kelembagaan politik, padahal membuka peluang suburnya korupsi, sebab di negara manapun jika pembuat dan pengawas kebijakan adalah pihak yang sama, maka kecenderungan pelanggarannya akan semakin besar. Di Indonesia, pemerintah adalah juga kader partai atau koalisi partai yang memiliki perwakilan di DPR. Posisi ini akan menyulitkan partai politik mengoreksi kebijakan pemerintah bila dipandang bertentangan dengan konstitusi negara, sebab yang membuat kebijakan adalah bagian mereka sendiri. Independensi kelembagaan juga sangat tergantung pada kemandirian partai politik dengan dukungan finansial yang kuat. Sumbangan pemerintah kepada partai politik sebesar 13 miliar tentu kurang memadai di samping tidak transparannya pendanaan partai politik, baik sumber dan penggunaannya. Masalah ini ramai dibicarakan ketika ada usulan di era Mendagri Cahyo Kumolo pada 11 Maret tahun 2015, agar partai politik dibiayai oleh negara sebesar 1 triliun untuk tiap partai yang dikomentari banyak kalangan, mulai dari kader partai, LSM, anggota partai, dan pengamat politik, (Perludem, 2015). Tujuan Mendagri agar dapat mengatasi politik uang dan merajalelanya praktik korupsi disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh para politisi selama ini. Tanggapan negatif muncul dikarenakan kinerja partai politik dan anggota DPR yang masih sangat mengecewakan.

Berbeda dengan Jerman walau menganut kapitalisme, pemberian subsidi kepada partai yang lolos ke parlemen sudah lama diterapkan. Meski awalnya dikhawatirkan memunculkan kartel politik (Partogi, 2021) karena pendanaan partai yang transparan, tuduhan ini dianggap tidak beralasan. Sebab selama pemilu yang jujur dan adil masih berjalan dengan baik, kepentingan partai politik untuk melanggengkan kekuasaannya di pemerintahan melalui koalisi pragmatis demi mempertahankan subsidi keuangan dari negara dapat dihindarkan. Berbeda dengan Indonesia, di Jerman koalisi sudah dibentuk sebelum pemilu yang memperkecil peluang manipulatif dengan memperlakuk pendukung loyalis atau konstituen yang awam politik. Di Jerman, proses politik berlangsung sangat transparan, pemilih juga melek politik dan



memiliki kesadaran politik yang tinggi, partai yang curang akan mendapatkan hukuman publik di akhir koalisi dan ketika pemilihan baru di laksanakan.

Pendanaan partai dari sumbangan anggota dan kader sebagai bentuk loyalitas anggota partai politik mereka masing-masing adalah pembuktian partisipasi politik, tetap masih membutuhkan subsidi dari negara, sebagai bukti komitmen negara untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Cara ini dapat mengontrol proses politik untuk memerecil kekuatan kapitalis mengendalikan sistem politik lebih luas, adalah melalui langkah demokratisasi menuju konsolidasi. Memperkuat keuangan partai politik dengan dukungan financial, dan mengawasi penggunaannya dengan ketat. Langkah ini di samping menciptakan proses suksesi kekuasaan yang elegan, juga dapat mengontrol jalannya kekuasaan dengan efektif hingga kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.

## SIMPULAN

Polarisasi tidak berbahaya bagi proses demokratisasi Indonesia selama aktor politik, pegiat demokrasi, penyelenggara pemilu, pemerintah dan seluruh masyarakat bersikap bijak dalam menentukan langkah dan pilihan politik. Politik identitas sebagai satu di antara pemicu polarisasi tidak perlu dikhawatirkan berlebihan, karena berdasarkan hasil penelitian ini, hanya menempati urutan kedua faktor penyebab polarisasi dengan prosentase yang kecil. Penelitian sebelumnya biasa hanya berfokus pada persoalan primordialisme dalam mengurai polemik demokrasi elektoral. Naum penelitian ini lebih tajam secara objektif mengupas suksesi kekuasaan, tidak hanya terbatas pada proses, tetapi bagaimana menghasilkan kepemimpinan yang kredibel dan cerdas melalui pertarungan ide dan gagasan, membuat kebijakan publik untuk mengurai serta menyelesaikan persoalan bangsa. Dan kepemimpinan yang kuat, akan lahir dari sebuah konsolidasi demokrasi berdasarkan literasi politik kebangsaan yang arif dan mapan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abramowitz, Al, & Saunders, KL. (2008). Apakah polarisasi adalah mitos?, *Jurnal Politik*, 70(2), 542–555. <https://doi.org/10.1017/S0022381608080493>
- Ahmed, S., & Matthes, J. (2017). Representasi media tentang Muslim dan Islam dari tahun 2000 hingga 2015: Sebuah meta-analisis. *Lembaran Komunikasi Internasional*, 79(3), 219–244. <https://doi.org/10.1177/1748048516656305>
- Arceneaux, K., Johnson, M., & Cryderman, J. (2013). Komunikasi, persuasi, dan nilai pengkondisian selektif paparan: Seperti pikiran yang mungkin bersatu dan terpecah tetapi sebagian besar tidak selaras. *Komunikasi Politik*, 30(2), 213–231.
- Banks, A., Calvo, E., Karol, D., & Telhami, S. (2021). #Polarizedfeeds: Tiga percobaan tentang polarisasi, pembingkai, dan media sosial. *Jurnal Internasional Pers/Politik*, 26(3), 609–634. <https://doi.org/10.1177/1940161220940964>
- Bos, L., Kruikemeier, S., & de Vreese, C. (2016). Mengikat negara: Bagaimana penyiaran layanan publik mengurangi seleksi politik paparan aktif. *PLOS SATU*, 11(5), e0155112. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155112>
- Chang, K., & Park, J. (2020). Penggunaan Media Sosial dan Partisipasi dalam Duel Protes: Kasus Presiden 2016-2017 skandal korupsi di Korea Selatan. *Jurnal Internasional Pers/Politik*, 26(3), 547–567. <https://doi.org/10.1177/1940161220940964>
- Chinn, S., Hart, PS, & Soroka, S. (2020). Politisasi dan polarisasi dalam konten berita perubahan iklim, 1985-2017. *Ilmu Komunikasi*, 42(1), 112–129. <https://doi.org/10.1177/1075547019900290>
- Dalton, RJ (1987). Perubahan generasi dalam keyakinan politik elit: Pertumbuhan polarisasi ideologis. *Jurnal dari Politik*, 49(4), 976–997. <https://doi.org/10.2307/2130780>
- Emily Kubin & Christian von Sikorski. 2021. Peran media (sosial) dalam polarisasi politik: Tinjauan Sistematis, *Annal of the International Communication Association*, 45:3, 188:206.
- Fukuyama, Francis. 2001. *The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the Franch Revolution*, New York, Farrar, Straus & Giroux.
- Fukuyama, Francis. 2018. *Identity: The Demand for Dignity and The Politics of Resentmen*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Gaertner, SL, Docido, JF, Anastasio, PA, Bachman, BA, & Karat, MC (1993). Model identitas in-group yang umum: Rekategori dan pengurangan bias antarkelompok. *Tinjauan Eropa tentang Psikologi Sosial*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/14792779343000004>



- Garrett, RK, Long, JA, & Jeong, MS (2019). Dari media partisan ke mispersepsi: Polarisasi afektif sebagai mediator. *Jurnal Komunikasi*, 69(5), 490–512. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz028>
- Gidron, N., Adams, J., & Horne, W. (2019). Menuju agenda penelitian komparatif tentang polarisasi afektif secara missal publik. *Buletin Politik Komparatif APSA*, 29,30–36.
- Hare, C., & Poole, KT (2014). Polarisasi politik Amerika kontemporer. *Politik*, 46(3), 411–429. <https://doi.org/10.1057/pol.2014.10>
- Heaney, MT, Masket, SE, Miller, JM, & Strolovitch, DZ (2012). Jaringan terpolarisasi: Afiliasi organisasi dari delegasi konvensi partai nasional. *Ilmuwan Perilaku Amerika*, 56(12), 1654–1676. <https://doi.org/10.1177/0002764212463354>
- Iyengar, S., Sood, G., & Lelkes, Y. (2012). Mempengaruhi, bukan ideologi: Perspektif identitas sosial tentang polarisasi. *Opini public Kwartalan*, 76(3), 405–431. <https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>
- Johnson, TJ, & Lee, AM. 2015. Kick the bums out ?: Model persamaan struktural yang mengeksplorasi sejauh mana aliran dan sumber partisan mempengaruhi polarisasi dan sikap anti petahana. *Studi Pemilu*, 40,210–220. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2015.08.008>
- Johnson, TJ, Kaye, BK, & Lee, AM. (2017). Dibutakan oleh dendam? Model jalur sikap politik, selektivitas, dan sosial media. *Jurnal Komunikasi Atlantik*, 25(3), 181196. <https://doi.org/10.1080/15456870.2017.1324454>
- Mann, M., Merhout, F., & Volfovsky, A. (2018). Paparan pandangan yang berlawanan di media sosial dapat meningkatkan polarisasi politik. *Prosiding National Academy of Sciences*, 115(37), 9216–9221. <https://doi.org/10.1073/pnas.1804840115>
- Mitzner, Marcus and Edward Aspinall. 2010. *Problem Democratization in Indonesia*, Singapore, ISEAS.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2021. *Transisi Dan Kandasnya Konsolidasi Demokrasi Pasca Suharto*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Perludem, (2015). Kenaikan Dana Rp 1Trilyun untuk Parpol Terlalu Drastis, Jakarta, Kompas.com.
- Warburton, Eve. 2020. Judul Laporan: Polarisasi Politik di Asia Selatan dan Tenggara Subjudul Laporan: Divisi Lama, Bahaya Baru Editor Laporan: Thomas Carothers, Andrew O'Donohue Diterbitkan oleh: Carnegie Endowment for International Peace (2020) URL Stabil: <https://www.jstor.org/stable/resrep26920.8>